

## Konstruksi Berita Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto di Media Online

Construction of Setya Novanto's E-KTP Corruptions Case News In *Online* Media

<sup>1</sup>Aldi Hamdan Yuafialdillah, <sup>2</sup>Ratri Rizki K., S.Sos., M.I.Kom

<sup>1,2</sup>*Prodi Ilmu Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung.*

*Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email: <sup>1</sup>aldi.hyua@gmail.com, <sup>2</sup>ratri.rizki@yahoo.com*

**Abstract.** Media that became a means of political communication tend to have a supported party or a party to be downed by the media using the news they published. The existence of hidden interests from the mass media also influences the news that conveyed to the public. Then it makes the facts in the news received by the reader is not a fact that has a hundred percent objectivity, but the first received fact that has passed the construction process. Interesting thing for the researcher in this study is Setya Novanto who currently serves as Chairman of the 2014-2019 in DPR (Legislative Assembly of Indonesia) and General Chairman of the 2016-2019 Golkar Party who entered the list of suspects in corruption cases of e-KTP project procurement by the KPK (Corruption Eradication Commission) and also whether the position he has affects the news published by the mass media. Using constructivism paradigm and qualitative approach, this research conducted to find out how the mass media, especially on online media *viva.co.id* and *mediaindonesia.com* frame or construct news on the issue of Setya Novanto's E-KTP corruption case and how are the *viva.co.id* and *mediaindonesia.com* alignments in the news. In the process, this study analyzes the news of *viva.co.id* and *mediaindonesia.com* using the method of framing analysis from Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, which the elements examined are syntactic, script, thematic, and rhetorical of a news. The final result of this study shows that *viva.co.id* and *mediaindonesia.com* have a different frame in reporting the issue of Setya Novanto's E-KTP corruption case. In its announcement, *viva.co.id* tends to be in the Setya Novanto side by reporting which is only informative, while *mediaindonesia.com* in its news appears to be in the KPK side.

**Keywords:** Framing, Media Alignments, Media Online, E-KTP Corruption Case, Setya Novanto.

**Abstrak.** Media yang menjadi sarana komunikasi politik cenderung memiliki pihak yang didukung atau pihak yang akan dijatuhkan oleh media itu menggunakan pemberitaan yang diterbitkannya. Adanya kepentingan terselubung dari media massa turut mempengaruhi berita yang disampaikan kepada khalayak, yang kemudian membuat fakta dalam pemberitaan yang diterima oleh pembaca bukanlah fakta yang memiliki nilai keobjektifan seratus persen, melainkan fakta yang diterima terlebih dahulu telah melewati proses konstruksi. Hal yang menarik bagi penulis dalam penelitian ini, yaitu terhadap Setya Novanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR 2014-2019 dan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 yang masuk kedalam daftar tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP oleh KPK dan juga apakah dengan jabatan yang dia miliki mempengaruhi pemberitaan yang diterbitkan oleh media massa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana media massa khususnya pada media online *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* membingkai atau mengkonstruksikan berita isu kasus korupsi E-KTP Setya Novanto serta bagaimana keberpihakan *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* dalam pemberitaan terkait isu tersebut. Dalam prosesnya penelitian ini menganalisis pemberitaan *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* menggunakan metode analisis framing dari model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dimana unsur atau elemen yang diteliti adalah sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dari sebuah berita. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* memiliki bingkai yang berbeda dalam memberitakan isu kasus korupsi E-KTP Setya Novanto. Dalam pemberitaannya *viva.co.id* cenderung berada pada kubu Setya Novanto dengan melakukan pemberitaan yang hanya bersifat informatif, sedangkan *mediaindonesia.com* pada pemberitaannya terlihat berada pada kubu KPK dan menyudutkan Setya Novanto.

**Kata Kunci :** Framing, Keberpihakan Media, Media Online, Korupsi E-KTP, Setya Novanto.

### A. Pendahuluan

Korupsi di Indonesia bukanlah hal yang asing bagi kita semua, dari dulu bahkan mungkin dari negara Indonesia belum merdeka pun praktik-praktik korupsi sudah sering terjadi. Singkatnya korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh

pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dengan tindakan tersebut secara ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik atau menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan sepihak yang mengakibatkan negara mengalami kerugian.

Sepanjang tahun 2017, salah satu isu yang menjadi sorotan publik adalah mengenai tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan e-KTP. Dari beberapa tersangka dalam proyek e-KTP yang ditetapkan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (17/7/2017), nama seorang Setya Novanto menjadi salah satu yang masuk kedalam daftar tersebut. Nama Setya Novanto yang sekarang menjabat sebagai Ketua DPR 2014-2019 dan Ketua Umum Partai Golkar 2016-2019 disebut-sebut ikut andil dalam kasus korupsi proyek e-KTP. Ini bukan kali pertamanya nama Setya Novanto terseret dalam kasus korupsi, pada beberapa waktu lalu dalam pengadilan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012, namanya disebut-sebut juga oleh bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dalam sidang kasus di proyek Kementerian Dalam Negeri.

Kasus ini menarik karena memperlihatkan bagaimana hukum di Indonesia bisa dipertanyakan. Pada sidang perdana kasus dugaan pengadaan e-KTP yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 9 Maret 2017 dengan terdakwa Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan sipil, Irman, lagi-lagi nama Setya Novanto di sebut-sebut menerima sejumlah uang dari anggaran dana (e-KTP).

Dalam hal ini media massa adalah salah satu alat untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan akan informasi bagi manusia dimana merupakan sebagai perantara antara objek realitas dan subjek, hal ini menjadikan media massa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk, mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat melalui pesan yang disampaikan, bahkan pesan atau pemberitaan yang dilakukan oleh media massa dapat mengubah pola perilaku dari khalayaknya itu. Itulah yang membuat mengapa efek dari media massa sangatlah kuat dalam membentuk dan mengubah pandangan seseorang akan suatu hal. Media juga memiliki tanggung jawab kepada khalayak untuk memberikan informasi yang beragam. Tidak hanya mempengaruhi pembaca akan tetapi media dapat membawa pembaca untuk membenarkan apa yang telah diberitakan. Dalam mengkonstruksikan fakta-fakta, media memberikan beragam makna untuk menyembunyikan fakta tersebut yang dituangkan dalam berita. Makna-makna tersebut menjadi sebuah identitas media itu dalam mbingkai suatu kejadian atau realitas berdasarkan ideologi media tersebut. Dalam pembedaan beritanya adanya kepentingan seperti dari internal atau eksternal dapat mempengaruhi tulis berita tersebut.

Kepentingan-kepentingan yang bermain dalam media inilah yang membuat kualitas pemberitaan sangat tergantung pada kebijakan institusi. Tugas media untuk menyampaikan pemberitaan apa adanya yang netral berubah menjadi kepentingan terselubung dari institusi media tersebut. Hanya dalam satu peristiwa, dapat diberitakan dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam satu peristiwa media yang satu bisa menonjolkan sisi A namun media lainnya bisa menonjolkan sisi B peristiwa. Misalnya dalam kasus peristiwa demo mahasiswa yang berakhir anarki. Satu media menonjolkan peristiwa tersebut sebagai aksi anarkis mahasiswa yang bisa mengganggu keamanan umum, namun media lain

menonjolkan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengawasan pemerintahan.<sup>1</sup>

Melalui hal ini, seperti yang dikatakan oleh Alex Sobur dalam bukunya ‘Analisis Teks Media’ terdapat tiga pendekatan penelitian analisis media yang membuat kita dapat memahami bahwa sebenarnya isi media dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi media itu sendiri, yaitu dengan pendekatan *Discourse Analysis* (analisis wacana), *Semiotic Analysis* (analisis semiotika), dan *Framing Analysis* (analisis framing). (Sobur, 2012:3)

Dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan penelitian pada *Framing Analysis*, karena melalui metode ini dapat terlihat seperti apa pembingkaiannya yang dilakukan suatu media untuk menonjolkan suatu isu atau sosok dalam pemberitaan yang dilakukannya. Penonjolan atau penekanan aspek tertentu dari realitas tersebut haruslah dicermati lebih jauh, karena akan membuat bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih mudah untuk diingat, dan lebih mengena dalam pikiran pembaca.

Terkait dengan hal di atas, banyak model dalam analisis framing, namun yang dianggap tepat untuk menganalisis pembingkaiannya pemberitaan mengenai kasus korupsi E-KTP Setya Novanto, yaitu model Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan menggunakan struktur secara sintaksis, skrip, tematik, dan retorik, diharapkan keempat struktur tersebut merupakan rangkaian yang dapat menunjukkan *framing* dari suatu media. Berdasarkan konteks penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini adalah:

“Bagaimana pembingkaiannya berita mengenai kasus korupsi E-KTP Setya Novanto dan seperti apa “keberpihakan media” pada media *online* *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* terkait isu tersebut”.

Berdasarkan fokus penelitian, maka identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembingkaiannya berita mengenai kasus korupsi E-KTP Setya Novanto di media *online* *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* dilihat dari Struktur Sintaksis, Skrip, Tematik dan, Retorik?
2. Bagaimana “keberpihakan media” khususnya pada media *online* *viva.co.id* dan *mediaindonesia.com* terhadap isu kasus korupsi E-KTP Setya Novanto ?

## **B. Landasan Teori**

Sebagai suatu bentuk komunikasi massa, media *online* tidak hanya mengandalkan komunikator semata, dalam hal ini, wartawan sebagai pembawa sumber berita, akan tetapi seringkali menjadikan pembaca itu sendiri sebagai komunikator berita. Masyarakat dan wartawan sama-sama bisa menjadi komunikator bila di antara mereka memiliki fakta, data serta ide yang penting untuk diketahui orang banyak. Komunikasi massa memiliki berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi yang paling sederhana dikemukakan oleh Bittner (Rakhmat, 2005: 188) pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (*mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people*). Definisi yang lebih terperinci dikemukakan oleh ahli komunikasi lain, yaitu Gebner. Menurut Gebner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang *kontinyu* serta paling luas dimiliki orang dalam masyarakat industri (Rakhmat, 2005: 188).

Dari definisi tersebut dapat digambarkan bahwa komunikasi massa itu

<sup>1</sup> Jiwarka, Novrian Panji Sawung. Subagyo. (2013). Keberpihakan Media Massa. Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoe dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013. 2.

menghasilkan suatu produk berupa pesan-pesan komunikasi. Produk tersebut disebarkan ke khalayak luas secara terus menerus dalam jarak waktu yang tetap. Jadi pada prinsipnya komunikasi massa merupakan informasi yang disebarkan kepada publik melalui suatu medium (media massa) yang dapat menjangkau khalayak luas secara serentak. Akan tetapi komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau pesan saja, tetapi komunikasi dilakukan seorang dengan pihak lainnya dalam upaya membentuk suatu makna serta mengemban harapan-harapannya (Ruslan, 2003:83). Dengan demikian komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk mencapai tujuan.

Media pers sebagai bagian dari komunikasi massa, memiliki peran penting sebagai saluran (*channel*) komunikasi politik, khususnya ketika komunikasi politik itu mempertemukan berbagai kepentingan di ruang publik. Ketika dalam posisi itu, maka media pers telah memosisikan dirinya sebagai “ruang publik” bagi berbagai pihak untuk bertemu. Oleh karenanya, sebagai ruang publik, tempat bertemunya berbagai kepentingan, media pers memiliki kekuatan dan pengaruh tersendiri dalam membentuk opini publik. Dalam konteks publikasi itu, media pers menjadi representasi dari kepentingan khalayak. Representasi itu diarahkan pada keberpihakan media kepada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan publik. Semua elemen memiliki hak yang sama untuk mengekspresikan opini dan komunikasi politiknya di media pers secara rasional dan proporsional. Sebab, dalam pandangan Subianto dan Ida (2012:53), proses komunikasi politik yang terjadi, terutama di kalangan akar rumput (*grassroot*), dan beberapa di kalangan elit masih lebih banyak berbentuk “kurang rasional”.<sup>2</sup>

Dalam definisi jurnalistik, seperti dikutip Assegaf (1982:54) dikatakan, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasak, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena penting atau akibatnya, entah pula karena dia mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi, dan ketegangan. Penekanan Assegaf terhadap definisi ini adalah bahwa berita lebih pada suatu proses bagaimana terciptanya suatu berita, dari fakta atau ide yang didapat oleh wartawan, kemudian dipilih oleh staf redaksi lalu disiarkan kepada masyarakat.

Abrar memberikan pengertian yang agak berbeda. Sesungguhnya berita adalah “hasil rekonstruksi tertulis dari realitas sosial yang terdapat dalam kehidupan. Itulah sebabnya ada orang yang beranggapan bahwa penulisan berita lebih merupakan pekerjaan merekonstruksikan realitas sosial ketimbang gambaran dari realitas itu sendiri”. (Abrar, 2005:2).

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi pengadaan proyek E-KTP dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga peristiwa, yaitu yang pertama peristiwa “Penetapan Status Tersangka Setya Novanto Terkait Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP, kedua peristiwa “Sidang Praperadilan Status Tersangka Setya Novanto Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP” dan, yang ketiga yaitu peristiwa “ Penetapan Status Tersangka Setya Novanto Untuk Kedua Kalinya Terkait Korupsi Pengadaan Proyek E-KTP”.

Melalui metode analisis framing, penulis menggali dan mengungkapkan strategi

<sup>2</sup> Sjucho, Dian Wardiana. Hendra Alfani. (2017). Jurnalisme Politik dan Konstruksi Keberpihakan Media Dalam Pilgub DKI Jakarta. Analisis Framing Headline Harian Media Indonesia dan Republika Sehari Sebelum dan Sehari Sesudah Pencoblosan Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua 2017. 370.

yang digunakan pada teks berita yang diteliti. Karena teks berita tak cukup kasat untuk dikenali, dan diperlukan metode tersendiri untuk mengetahui makna yang tersirat dalam teks.

### **Framing “Ketua DPR RI Sebagai Tersangka” versus “Ketua Umum DPP Partai Golkar Sebagai Tersangka”**

Pada berita peristiwa pertama *viva.co.id* menggunakan judul ”Setya Novanto Jadi tersangka Kasus E-KTP” tentu saja ada maksud yang dapat ditafsirkan. Namun, menurut penulis judul yang digunakan terlihat hanya bersifat informatif saja, berbeda dengan *mediaindonesia.com*, dalam judul berita terkait peristiwa pertamanya *mediaindonesia.com* menggunakan judul yang sangat tegas dengan menggunakan kalimat “Novanto Akhirnya Tersangka”. Penggunaan kata “akhirnya” pada *headline* yang digunakan memperlihatkan suatu hal yang sudah ditunggu-tunggu dan juga terlihat adanya kepuasan akan terjadinya hal tersebut. Dalam hal ini *mediaindonesia.com* seperti sangat menunggu-nunggu dimana Setya Novanto dijadikan tersangka kasus korupsi E-KTP oleh KPK.

Yang menarik pada kedua *lead* di atas adalah jabatan Setya Novanto yang digunakan oleh kedua media ini berbeda, dimana *viva.co.id* menggunakan jabatan Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI sedangkan *mediaindonesia.com* menggunakan jabatan Setya Novanto Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Menggunakan jabatan Setya Novanto Sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pasti ada maksud dan tujuan tersendiri. Penggunaan jabatan itu (Ketua Umum DPP Partai Golkar) memperlihatkan bahwa *mediaindonesia.com* menggunakan kesempatan ini untuk menurunkan elektabilitas partai Golkar dimana seorang ketua umum DPP nya terlibat korupsi. Peristiwa ini secara sadar tidak sadar sedikit dimanfaatkan oleh *mediaindonesia.com* untuk menyerang partai Golkar, kenapa hal ini dilakukan oleh *mediaindonesia.com* bisa dilihat dari kepemilikan *mediaindonesia.com* itu sendiri, *mediaindonesia.com* dimiliki oleh Surya Paloh yang bergabung dalam Media Group yang di pimpin oleh Surya Paloh. Selain itu juga Surya Paloh menjabat sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, maka dari itu terlihat adanya unsur kesadaran dalam *lead* yang digunakan pada beritanya. Selain itu juga terlihat pada awalan kalimat dimana wartawan *mediaindonesia.com* menuliskan “KPK ‘akhirnya’ menetapkan tersangka baru dalam kasus EKT.” Memperlihatkan bahwa *mediaindonesia.com* sudah menunggu-nunggu KPK untuk menetapkan tersangka baru.

### **Framing “Penetapan Status Tersangka Tidak Sah” Versus “Kekecewaan KPK Terhadap Hakim”**

Pada berita peristiwa kedua, yaitu; sidang praperadilan status tersangka Setya Novanto terkait kasus korupsi pengadaan proyek E-KTP dalam berita yang ditulisnya *viva.co.id* masih terlihat condong berada di pihak Setya Novanto dengan melakukan pemberitaan yang hanya bersifat informatif, walaupun memang tidak terlihat jelas dalam pemberitaan yang dilakukannya membuat berada di pihak mana *viva.co.id* berada. Namun apabila dibandingkan dengan pemberitaan yang dilakukan oleh *mediaindonesia.com* menempatkan posisi sebagai pihak yang mendukung dan tidak

mendukung cukup terlihat jelas. *Mediaindonesia.com* dalam berita yang ditulisnya menggunakan beberapa narasumber yang condong berpihak mendukung KPK untuk dijadikan bahan pemberitaan yang ditulisnya.

### **Framing “Setya Novanto Kembali Jadi Tersangka” Versus “Kalah Sidang Praperadilan Tidak Membuat KPK Berhenti”**

Selanjutnya peristiwa ketiga mengenai penetapan status tersangka Setya Novanto untuk kedua kalinya, media *online* *vivanews.com* dan *mediaindonesia.com* dalam pemberitaan pertamanya terkait kasus ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan seperti berita-berita sebelumnya yang telah penulis analisa. Pada berita ini, kedua media *online* tersebut hanya menerbitkan tulisan yang hanya bersifat informatif saja. Frame *vivanews.com* dan *mediaindonesia.com* hanya berupa pernyataan dari Saut Situmorang (Wakil Ketua KPK) yang dijadikan narasumber tunggal dalam beritanya, Dalam menuliskan beritanya, *vivanews.com* dan *mediaindonesia.com* langsung menceritakan apa yang terjadi, lalu menjelaskan kenapa itu terjadi.

Namun adanya sedikit perbedaan antara dua media ini dalam pemberitaannya, *mediaindonesia.com* menambahkan fakta yang menyatakan bahwa KPK kalah dalam sidang praperadilan terkait kasus korupsi E-KTP Setya Novanto.

### **Keberpihakan Media**

Pada pemberitaan yang ditulis *viva.co.id*, *viva.co.id* seperti tidak memihak pada kubu manapun terlihat dari tidak agresifnya isi berita yang ditulisnya. Numun, menurut penulis hal ini bisa dipengaruli oleh latar belakang pemilik *viva.co.id*, dimana media *online* ini dimiliki oleh Aburizal Bakrie yang seorang mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Sebelumnya. Pemberitaan yang hanya bersifat informatif terlihat seperti ingin meredam isu ini di publik. Berbeda dengan *mediaindonesia.com* dalam berita yang ditulisnya cukup terlihat agresif menyudutkan Setya Novanto dan terlihat berada pada memposisikan diri berpihak kepada KPK, hal ini terlihat dari narasumber-narasumber yang digunakan oleh *mediaindonesia.com* dalam penulisan beritanya, semua narasumber yang diwawancarai cenderung berpihak kepada KPK.

### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Berdasarkan Pendekatan *Framin* yang digunakan dalam penelitian ini maka, ditemukan bahwa:

Dilihat dari struktur sinkaksis dalam penggunaan *headline*, *lead*, latar informasi dan penutup dalam ketiga teks berita, *viva.co.id* tidak terlihat agresif dan hanya bersifat informatif saja. Hal ini bila dilihat sekilas tidak akan terlihat dimana *viva.co.id* meposisikan dirinya, namun apabila ditelaah lebih dalam *viva.co.id* dengan melakukan pemberitaan seperti ini terlihat berusaha tidak menjatuhkan atau menyudutkan nama Setya Novanto dengan tidak memasukan sudut pandang lain dalam pemberitaannya. Seperti ingin membuat berita terkait kasus ini bukan lah hal yang luar biasa. Sedangkan pada struktur sintaksis media *online* *mediaindonesia.com* sangat jelas dalam teks beritanya berusaha menyudutkan Setya Novanto dan mendukung KPK. Hal ini bisa dilihat dari *headline*, *lead*, latar informasi dan penutup yang digunakan.

Dilihat dari struktur skrip, pengisahan pada ketiga teks berita *viva.co.id* hanyamendeskripsikan apa yang sedang terjadi. Pengisahannya hanya bersifat

informatif dan tidak agresif. Sedangkan *mediaindonesia.com* pada struktur ini terlihat jelas dimana memosisikan dirinya. Hal ini terlihat dari *mediaindonesia.com* menambahkan fakta-fakta lain seperti tindakan KPK yang menetapkan Setya Novanto tidak ada kaitannya dengan Pansus Hak Angket KPK, Setya Novanto sebaiknya mundur dari jabatannya. Dalam struktur ini *mediaindonesia.com* secara jelas bahwa *mediaindonesia.com* lebih menyudutkan posisi Setya Novanto dan berpihak pada KPK.

Pada struktur tematik *viva.co.id* terlihat bahwa dalam pemberitaannya mendukung Setya Novanto, pada teks berita pertama dan ketiga yang isi beritanya terkait penetapan Setya Novanto sebagai tersangka, teks berita yang dibuatnya hanya bersifat informatif. Sedangkan pada teks berita kedua yang menyatakan bahwa penetapan status tersangka oleh KPK dinyatakan tidak sah oleh hakim pada sidang praperadilan. Isi beritanya cukup terlihat memosisikan diri pada pihak Setya Novanto dengan menggunakan opini wartawan yang menyatakan bahwa Setya Novanto dapat sedikit lega dengan hasil putusan sidang praperadilan, dan juga memasukan pernyataan dari hakim yang mengharuskan penyidikan terkait Setya Novanto harus dihentikan. Sedangkan pada teks berita *mediaindonesia.com* dari teks berita pertama dan kedua sudah terlihat bahwa *mediaindonesia.com* berada pada pihak KPK dan menyudutkan Setya Novanto dalam pemberitaannya.

Lalu dilihat dari struktur retorik, *viva.co.id* hanya pada teks berita kedua terlihat secara langsung adanya hal yang ingin ditonjolkan kepada khalayak. Seperti menggunakan pernyataan hakim yang seakan berpihak kepada Setya Novanto dalam teks beritanya. Sedangkan *mediaindonesia.com* pada teks berita pertamanya ingin menegaskan bahwa Setya Novanto terlibat dalam kasus korupsi E-KTP dan berusaha ingin menggiring khalayak untuk setuju dengan *mediaindonesia.com* bahwa Setya Novanto harus mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Lalu pada teks berita terkait KPK kalah dalam sidang praperadilan berusaha menegaskan bahwa hasil dari sidang itu dapat membuat penanganan kasus korupsi E-KTP menjadi terhambat secara tidak langsung ingin menggiring khalayak untuk tidak setuju dengan keputusan hakim pada sidang praperadilan status tersangka Setya Novanto. Lalu pada teks berita ketiga *mediaindonesia.com* berusaha menegaskan bahwa KPK tidak berhenti untuk menyelesaikan kasus korupsi walaupun pada sidang praperadilan KPK merupakan pihak yang kalah.

## 2. Keberpihakan Media.

Dari temuan dan analisis yang dilakukan penulis pada bab sebelumnya, terlihat bahwa *viva.co.id* dengan pemberitaannya yang tidak agresif secara tidak langsung atau tidak sadar berada pada pihak Setya Novanto. Sedangkan *mediaindonesia.com* dengan pemberitaannya yang cukup agresif dan sedikit menyudutkan Setya Novanto dengan menggunakan narasumber-narasumber untuk melengkapi beritanya yang cenderung berpihak kepada KPK, maka *mediaindonesia.com* memosisikan berada pada kubu KPK.

## Daftar Pustaka

- Abrar, Ana Nadya. 2005. *Mengurai Permasalahan Jurnalisme*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan
- Assegaff, Djaffar. 1982. *Jurnalistik Masa Kini, Pengantar ke Praktik Kewartawanan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Rakhmat, Jalaludin. 2005. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ruslan, Rosady. 2003. *Metode Penelitian PR dan Komunikasi*. Jakarta : PT. Raja. Grafindo Persada

Sobur, Alex. 2012. *Analisis Teks Media*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

### **Sumber Lain**

Jiwarka, Novrian Panji Sawung. Subagyo. (2013). Keberpihakan Media Massa. Studi Kualitatif Analisis Framing Konflik Nasdem antara Hary Tanoë dan Surya Paloh dalam Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media Indonesia Periode 22 – 31 Januari 2013. 2.

Sjuchro, Dian Wardiana. Hendra Alfani. (2017). Jurnalisme Politik dan Konstruksi Keberpihakan Media Dalam Pilgub DKI Jakarta. Analisis Framing Headline Harian Media Indonesia dan Republika Sehari Sebelum dan Sehari Sesudah Pencoblosan Pilgub DKI Jakarta Putaran Kedua 2017. 370.